

ABSTRAK

DEDY SYAHPUTRA

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku kejahatan yang berkaitan di dalam pengelolaan, pemanfaatan dalam lingkungan mengenai sumber daya ikan yang didasarkan pelaksanaan pada sistem dalam bisnis perikanan. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan atau suatu tindakan yang bertentangan dalam Undang-Undang.

Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan dalam proses perdagangan bibit lobster yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, bagaimana akibat hukum jika terjadi pelanggaran hukum dalam perdagangan bibit lobster, bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan perdagangan bibit lobster dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pengaturan dalam proses perdagangan bibit lobster yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yakni dengan melakukan : Berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya. Akibat hukum jika terjadi pelanggaran hukum dalam perdagangan bibit lobster. perbuatan tindak pidana ekspor benih lobster tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyelundupan barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Kepabeanan yang memenuhi semua unsur "setiap orang" dan "mengeksport barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean". Pertimbangan hakim atas tindakan perdagangan bibit lobster dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 907/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 29 Agustus 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 11 Juli 2023 harus diperbaiki mengenai status barang bukti. Bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Memperdagangkan, Bibit Lobster.

ABSTRACT

DEDY SYAHPUTRA

Criminal acts committed by a person or perpetrator of a crime related to the management, utilization in the environment regarding fish resources based on the implementation of the system in the fisheries business. A criminal act is an act or action that is contrary to the Law.

The problem is how to regulate the lobster seed trading process that is justified in the laws and regulations, what are the legal consequences if there is a violation of the law in the lobster seed trade, how is the judge's consideration of the lobster seed trading action in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 5947 K / Pid.Sus / 2023

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting a literature study which will then be analyzed legally.

Regulation in the lobster seed trading process that is justified in the laws and regulations is by doing: Based on the principles of benefit, justice, partnership, equity, integration, openness, efficiency, and sustainable sustainability. Must be based on the principle of planning and integrated control. Legal consequences if there is a violation of the law in the lobster seed trade. the criminal act of exporting lobster seeds without submitting a customs notification is qualified as a criminal act of smuggling goods without submitting a customs notification in accordance with the provisions of Article 102 letter a of the Customs Law which meets all the elements of "every person" and "exporting goods without submitting a customs notification". The judge's consideration of the lobster seed trade in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5947 K / Pid.Sus / 2023, the *judex facti* decision in this case does not conflict with the law and / or laws, so the cassation request from the Cassation Applicant / Defendants is declared rejected with revisions. Thus, the decision of the Surabaya High Court Number 907/PID.SUS/2023/PT SBY dated August 29, 2023 which upheld the decision of the Madiun Regency District Court Number 75/Pid.Sus/2023/PN Mjy dated July 11, 2023 must be revised regarding the status of evidence. That because the Defendants were convicted, they were burdened to pay court costs at the cassation level

Keywords: Responsibility, Trading, Lobster Seeds.